

## ABSTRAK

**Nia Nuri Handayani, 1203040099, 2024** *Perbedaan Masa Hilang (Mafqud) Yang Berakibat Perceraian Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 53 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, Perspektif Maqashid syariah*

Pernikahan dalam Islam sangat dijunjung tinggi keberadaannya, begitu pula sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan juga telah diatur di dalamnya, seperti *talaq*, *'iddah* dan *rujuk* serta yang lainnya. Namun dalam hal lain terdapat istilah (*mafqud*) hilangnya salah satu pasangan menimbulkan tantangan hukum yang unik, sehingga diperlukan pedoman yang jelas untuk melindungi hak pasangan yang ditinggalkan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk (1) mengetahui *mafqud* menurut Kompilasi Hukum Islam, (2) mengetahui *mafqud* menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, (3) mengetahui perspektif *maqashid syariah* tentang *mafqud* yang berakibat perceraian.

Kerangka teori yang digunakan adalah konsep *maqashid syariah*, yang dimana didalam *maqashid syariah* terdapat 5 keniscayaan (*zaruriyyat*) yang sering dipakai dalam kehidupan, namun penulis hanya mengambil *hifz al-nafs* (pelestarian jiwa) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan) dalam penelitian ini.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Sumber data utama berasal dari dokumen hukum resmi, kitab fiqh, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan kedua regulasi dan menilai kesesuaiannya dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam konteks perlindungan jiwa dan keturunan. Data dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan (1) menurut KHI bahwa hilangnya pasangan mafqud selama dua tahun tanpa kabar merupakan dasar yang cukup untuk mengajukan perceraian dengan dasar ketentuan pada kenyataan bahwa dalam jangka waktu dua tahun, upaya maksimal telah dilakukan oleh pihak yang ditinggalkan. (2) menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor bahwa pihak yang ditinggalkan mafqud dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangannya hilang tanpa kabar selama lebih dari satu tahun. (3) perspektif *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya kemaslahatan atau kebaikan bagi individu dan masyarakat. Dalam kasus *mafqud*, menimbang ketidakpastian mengenai status suami atau istri yang hilang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang ditinggalkan, seperti ketidakstabilan emosional, kesulitan ekonomi, dan ketidakjelasan hukum. Analisis ini menunjukkan bahwa kedua regulasi memiliki kelebihan masing-masing dalam konteks *maqashid syariah*, baik KHI maupun Enakmen UU Selangor memiliki kelebihan dalam konteks *maqashid syariah*. KHI lebih menekankan pada upaya pencarian maksimal pasangan yang hilang bahwa mereka benar-benar hilang, sedangkan Enakmen 53 lebih cepat memberikan kepastian hukum untuk mengurangi ketidakpastian dan beban emosional pasangan yang ditinggalkan. Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dalam menangani kasus *mafqud*.

**Kata Kunci:** *Mafqud, Perceraian, KHI, Enakmen UU selangor, Maqashid Syariah*